

# **Pengaruh Pengaruh Kpasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso)**

## ***The Effect of The Human Resource Quality, The Information Technology Usefulness and Internal Control to Reability of Financial Reporting of Local Government (Study on Bondowoso Sub Department of Local Government)***

**M. Rozi Muzakki**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)

Jl. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail : [m.rozi.muzakki@gmail.com](mailto:m.rozi.muzakki@gmail.com)

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuisisioner dengan lima skala likert pada 35 SKPD di Kabupaten Bondowoso. Untuk uji statistik dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *SPSS for windows 22*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (2) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (3) pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Kapasitas Sumber Daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan SKPD Kabupaten Bondowoso.

### ***Abstract***

*This research was intended to know the effect of The Influence of human resource capacity, utilization of information technology and internal control of financial reporting reability in the local government work units (SKPD) Bondowoso's regency. This research used primary data which was obtained from the respondents through five likert scale questionnaires which were research in 35 SKPD's in the regency. For statistical tools and data analyzed by using SPSS version 22. This research The findings show that: (1) The capacity of human resources significant positive effect on the reability of the local government financial reporting information; (2) the use of information technology significant positive effect on the reability of the local government financial reporting information; (3) the internal control significant positive effect on the reability of the local government financial reporting information; \*

**Keywords:** *human resource capacity, utilization of information technology internal control, financial reporting reability , and Bondowoso's local government work units (SKPD)*

## **Pendahuluan**

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah

alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:17).

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai

bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyebutkan bahwa pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Saat ini secara bertahap pemerintah mulai menerapkan *accrual base* sebagai basis akuntansi yang harus diterapkan dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah. Penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan akuntansi, dan menganalisis sistem akuntansi yang ada. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi (dapat diandalkan).

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut (Desi dan Ertambang, 2008).

Kebermanfaatan (*usefulness*) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terhadap pemakai. Informasi tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur pembentuk laporan yang bernilai menurut kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu; (b) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi; (c) Dapat dibandingkan, yaitu

informasi yang dimuat dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dengan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; (d) Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya.

Dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah tersebut, keterandalan merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Nurilla, 2014:24).

Hal pertama yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia. SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan kapasitas yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi dalam pengelolaan keuangan yang baik, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Warsino, 2008)

Faktor kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola kemampuan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks (Warsino, 2008).

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Wilkinson *et al.*;2000). Walaupun secara umum telah banyak diketahui

manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2008).

Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian intern. Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan; (b) efisiensi dan efektivitas operasi; dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif (Moscove *et al.*, 1990 dalam Triyuwono & Roekhudin, 2000).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern dan menggunakan variabel dependen yaitu keterandalan dan laporan keuangan pemerintah daerah. Penulis menggunakan variabel tersebut karena dalam beberapa penelitian terdahulu masih terjadi inkonsistensi hasil. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai informasi laporan keuangan, yaitu: Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Haviva (2014) bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Kabupaten Bondowoso memperoleh pemberian opini dari BPK yang berbeda-beda atas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemberian opini BPK atas pelaporan keuangan selama 10 tahun terakhir untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) sebanyak satu kali, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) sebanyak lima kali dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tiga kali (IHPS I Tahun 2015).

Opini tersebut diberikan oleh BPK karena laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya meliputi pencatatan yang tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan tidak memadai, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelayanan atas informasi keuangan yang kurang transparan. (IHPS I Tahun 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah? (2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah? (3) Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai: (1) Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. (2) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. (3) pengaruh pengendalian terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut. H1: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Daerah H2 : Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah H3 : Pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: Individu, organisasional, industri atau perspektif orang lain (Indriantoro dan Bambang, 2014:88).

Desain penelitian ini adalah survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden (Sugiyono, 2012:308). Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: metode survey dan metode observasi. Unit analisis penelitian ini yaitu keterandalan laporan keuangan daerah di Kabupaten Bondowoso.

Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket).

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuisisioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap pimpinan /kepala SKPD dan bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Peneliti juga melakukan tanya jawab (wawancara) kepada responden yang bersedia diwawancarai mengenai kondisi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian intern yang ada di satuan kerja responden. Lokasi penelitian terbatas di SKPD Kabupaten Bondowoso.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada seluruh SKPD di Kabupaten Bondowoso. Penyampelan atas responden dilakukan secara *purposive sampling* dengan pembatasan pada dinas, badan, kantor dan bagian saja dan memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, dalam Desi dan Ertambang 2008). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.
- Responden dalam penelitian ini adalah yaitu kepala bagian dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga setiap SKPD ditetapkan secara *purposive sampling* sebanyak 2 orang yang menjadi responden.
- Responden yang ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan keuangan/akuntansi SKPD.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Penentuan responden dengan jumlah 70 untuk 35 SKPD dengan masing-masing tiap SKPD 2 responden.

### Metode Analisis Data

Menurut Siregar (2013:85) pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

### Statistik Deskriptif

Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden, seperti jenis kelamin, jabatan, periode kerja, strata pendidikan dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

### Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: reliabilitas dan validitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *reliable* dan kurang *valid*.

### Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi melalui uji asumsi klasik.

## Hasil Penelitian

### Deskriptif Responden

Indriantoro dan Bambang (2014 :170), deskriptif responden adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para kepala staf bagian keuangan dan staf keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak 35 SKPD.

### Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
X1	50	23	50	42,04	3,74
X2	50	25	40	33,78	3,67
X3	50	33	45	39,58	3,63
Y1	50	28	35	32,1	2,74

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan tabel yang dipaparkan, akan diperoleh penjelasan yang berkaitan dengan variabel X1 mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 50. Standar deviasi 3.736 Adapun nilai rata-ratanya 42.04, dimana lebih tinggi dari nilai minimum yang ditentukan yaitu 33. Hal ini

menunjukkan bahwa responden memiliki penilaian bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki tingkat yang baik.

Variabel X2 mempunyai skor minimum 25, skor maksimum sebesar 40. Standar deviasi yang dimiliki 3.666 Adapun nilai rata-ratanya 33.78, dimana lebih tinggi dari nilai minimum yang ditentukan yaitu 25. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki penilaian bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki tingkat yang baik.

Variabel X3 mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 45. Standar deviasi yang dimiliki 3.626 Adapun nilai rata-ratanya sebesar 39.58, dimana lebih tinggi dari nilai minimum yang ditentukan yaitu 33. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki penilaian bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki tingkat yang baik.

## Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti melalui alat uji SPSS dapat dilihat bahwa nilai  $r_{tabel}$  adalah 0,279 dan nilai  $r_{hitung}$  pada masing-masing variabel pada tabel menunjukkan nilai yang lebih besar dibanding  $r_{tabel}$ . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $Y_2$  dinyatakan *valid*.

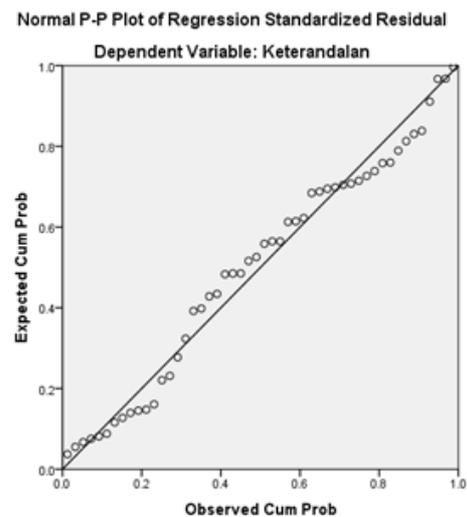
### Uji Reliabilitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti melalui alat uji SPSS dengan melihat nilai *Cornbach's Alpha* dari masing-masing variabel yang dapat dinyatakan reliabel apabila nilai *Cornbach's Alpha* dari tiap variabel lebih besar dari nilai standar reliabilitas, yaitu 0.60 (Sujarweni, 2014), yaitu pada  $X_1$  sebesar 0,765,  $X_2$  sebesar 0,752, variabel  $X_3$  sebesar 0,858, dan variabel  $Y$  sebesar 0,855. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas data berguna untuk menentukan distribusi data. Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (normal P-P plot) regresi. Titik-titik data yang dihasilkan pada gambar searah. Variabel dapat dikatakan normal karena titik-titik data mengikuti garis diagonal (Priyatno, 2013). Hasil dari Uji Normalitas Residual dapat dilihat pada gambar 4 berikut



Gambar Uji Normalitas

#### Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (*Variance Inflating Factor*)  $< 10$  dan *Tolerance*  $> 0,10$ . Pada hasil pengujian ditunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas tersebut memiliki nilai VIF  $< 10$ , yaitu 1,564 dan nilai *Tolerance*  $> 0,10$ , yaitu 0,639. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

#### Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan, bahwa dari grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola yang teratur, baik menyempit, melebar, maupun bergelombang-gelombang, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y_1 = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$= 6.849 + 0.198X_1 + 0.208X_2 + 0.250X_3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta dalam persamaan regresi tersebut adalah 6.849. Artinya, jika Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) bernilai 0, maka Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ( $Y_1$ ) sebesar 6.849
2. Nilai koefisien regresi variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) sebesar 0,198. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), maka nilai variabel Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ( $Y_1$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,198.
3. Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) sebesar 0,208. Artinya, jika terjadi

peningkatan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2), maka nilai variabel Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y1) akan mengalami peningkatan sebesar 0,208.

4. Nilai koefisien regresi pengendalian intern (X3) sebesar 0,250. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel pengendalian intern (X3), maka nilai variabel Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y1) akan mengalami peningkatan sebesar 0,250.

### Koefisien Determinasi

Pada model I, diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.447 atau 44.7%. hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 44.7%, sedangkan sisanya 55.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Angka koefisien (R) pada perhitungan sebesar 0.694 berarti hubungan antara variabel independen dengan dependen adalah cukup kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,50. *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 2.033; artinya semakin kecil nilai *SEE* maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

### Uji Koefisien Determinasi

Pada model I, diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.447 atau 44.7%. hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 44.7%, sedangkan sisanya 55.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Angka koefisien (R) pada tabel 4.13 diatas sebesar 0.694 berarti hubungan antara variabel independen dengan dependen adalah cukup kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,50. *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 2.033; artinya semakin kecil nilai *SEE* maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

### Uji F

Berdasarkan perhitungan dapat dinilai F-hitung sebesar 14.221 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk menguji kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah model yang layak dengan artian pemilihan variabel

independen dalam mempengaruhi variabel dependen sudah tepat.

### Uji t

Hasil perhitungan uji t dengan menggunakan Program *SPSS for Windows* dapat dilihat dari tabel 4.17. berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel terikat sebagai berikut:

- a. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia (X1) terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y1)

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa thitung dari variabel kapasitas sumber daya manusia (X1) yakni 2,150 dan Nilai ttabel 1,678. Tingkat signifikansi adalah 0,037. Hal ini berarti kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena thitung > ttabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka terbukti kebenarannya (H1 diterima).

- b. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X2) terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y1)

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa thitung dari variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) yakni 2.366 dan Nilai ttabel 1,678. Tingkat signifikansi adalah 0,022. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena thitung > ttabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka terbukti kebenarannya (H2 diterima).

- c. Pengaruh pengendalian intern (X3) terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y1)

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa thitung dari variabel pengendalian intern (X2) yakni 2.366 dan Nilai ttabel 1,678. Tingkat signifikansi adalah 0,022. Hal ini berarti pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena thitung > ttabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka terbukti kebenarannya (H3 diterima).

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t, variabel kapasitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,037. Artinya variabel ini berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan mengartikan bahwa  $H_1$  diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, maka akan meningkatkan keterandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Dari hasil uji statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia di SKPD Kabupaten Bondowoso memiliki kapasitas yang sangat baik sehingga berpengaruh terhadap nilai keterandalan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah yang juga menunjukkan hasil yang sangat baik.

## 2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,022. Artinya variabel ini berpengaruh positif terhadap diterima. Hal keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan mengartikan bahwa  $H_2$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dalam memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia maka akan meningkatkan keterandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil uji statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa teknologi informasi di SKPD Kabupaten Bondowoso selalu dimanfaatkan secara sangat baik dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap nilai keterandalan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah yang juga menunjukkan hasil yang sangat baik.

## 3. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t, variabel pengendalian intern memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,014. Artinya variabel ini berpengaruh positif terhadap diterima. Hal keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan mengartikan bahwa  $H_2$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pengendalian intern yang dimiliki, keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Dari hasil uji statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa pengendalian intern di SKPD Kabupaten Bondowoso selalu diterapkan secara sangat baik dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap nilai keterandalan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah yang juga menunjukkan hasil yang sangat baik.

## Kesimpulan dan Keterbatasan

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan

pelaporan keuangan pemerintah daerah; 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan 3) Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut yaitu 1) Penelitian ini dilakukan hanya dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi.; 2) Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data dengan cara disebar kepada responden tanpa wawancara sehingga ada kemungkinan responden tidak menjawab dengan jujur atau tidak serius; 3) Penelitian ini mempunyai kemungkinan *lineancy bias* yaitu adanya kecenderungan responden untuk memberikan skor jawaban yang lebih tinggi terhadap skor jawaban yang sebenarnya terjadi; 4) Hanya menggunakan 3 variabel yakni kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Deddi Noerdiawan, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. Yogyakarta: BPFE
- Ghozali, I. 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2003. *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Noerdiawan, D., Putra, L. S., dan Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business*. Edisi 4. Jakarta: Badan Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Jurnal / Skripsi / Tesis

- Alamsyah. 2014. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Empiris SKPD Kabupaten Bondowoso." Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Ariesta, F. 2013. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat)." Tidak Diterbitkan. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Haviva. L. 2014. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Jember)." Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Indriasari, D., dan Nahartyo, E. 2009. "Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir". *Jurnal Akuntansi*. Vol.11 (1): 30-65.
- Sugijanto. 2002. "Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999". *Lintasan Ekonomi*. Vol. 19 (1): 50-66
- Trisapura, A . 2013. "PengaruhPemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Empiris di Bengkulu." Tidak Diterbitkan. Skripsi . Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Widyaningrum, C. 2010. "Pengaruh SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Studi Empris di Pemda Subosukawonosraten." Tidak Diterbitkan. Thesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wilkinson, Michael, Raval, dan Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Edisi 4. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Zuliarti. 2012. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus." Tidak Diterbitkan. Skripsi. Kudus: Fakultas Ekonomi Universitas Maria Kudus.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara